

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seperti halnya instansi lainnya, Dinas Kesehatan Kota Lamongan merupakan sebuah wadah untuk menjalankan sebuah sistem keuangan dengan tujuan yang sama-sama telah ditentukan, baik secara *input, process, output*, dan *outcome*. Salah satu bentuk *Output* dari sebuah instansi adalah sebuah hasil akhir pengelolaan keuangan, yakni yang disebut dengan laporan keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan dan sebagai alat untuk pengambilan keputusan (*decision making*) (PSAP No. 1 Tahun 2005)

PP No.8 Tahun 2006 menyatakan, upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan disusun berdasarkan SAP.

Sebagai salah satu pilar penopang keberhasilan manajemen keuangan, sektor pendapatan sangat memerlukan pengetahuan dan keahlian dalam mengelola dan mengatur sistem pendapatannya. Besar kecilnya pendapatan akan menentukan tingkat kualitas pelaksanaan dan tingkat kemampuan dalam penyediaan pelayanan publik serta keberhasilan program kegiatan yang telah direncanakan. Maka suatu instansi daerah harus mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan secara kreatif dan inovatif dalam mengelola potensi ekonomi yang ada secara efisien dan efektif. Berbagai hal yang harus diperhatikan oleh instansi daerah dalam manajemen pendapatannya, yaitu dalam prinsip-prinsip dasar penerimaan dan mengenali sumber-sumber penerimaan.

Begitu sebaliknya, dampak yang akan dirasakan cukup mempengaruhi pada kinerja keuangan, apabila sistem informasi manajemennya tidak terlaksana dan tersusun dengan sebaik mungkin. Salah satu akibat atau dampak yang akan dirasakan oleh dinas/instansi daerah adalah tidak tercapai dan terpenuhinya target penerimaan tiap tahun, sehingga berakibat pada pengurangan target pada tahun berikutnya. Dampak tersebut akan mencerminkan tidak optimalnya pengelolaan keuangan daerah serta kebijakan pengalokasian anggaran secara baik dan kegagalan menciptakan pemerintahan yang baik.

Mengingat luasnya kewenangan daerah dalam pemerintahan, maka pada masa yang akan datang, daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat ini. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan berbagai bidang pemerintahan, termasuk bidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu, seharusnya dilakukan Pemerintahan Daerah adalah mengembangkan

kelembagaan agar mampu melaksanakan perannya semakin besar dan mengingat secara efektif, efisien dan akuntabel.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, dan efektif, sebuah dinas perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen pendapatan secara cermat, konsisten, dan berkelanjutan. Memang optimalisasi pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan beberapa aspek pendapatannya. Hal ini penting karena manajemen dan sistem tidak hanya terkait masalah teknis bagaimana menghasilkan pemasukan, tetapi terkait dengan strategi dan kebijakan mengalokasikan anggaran secara efisien, efektif, adil, dan merata dengan tujuan *Good Governance*. Kota Lamongan telah memenuhi *outputnya* sebagai salah satu instansi daerah, dengan berhasil membuat laporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas pada tahun 2013.

Dinas kesehatan Lamongan dalam sistem pencatatan pendapatannya masih berpatokan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.55 Tahun 2008, yang dapat dibidang masih sederhana dan mudah untuk diaplikasikan dalam pencatatannya dengan menggunakan dokumen-dokumen sah yang menjadi dasar pencatatannya. Begitu pun dengan manajemen keuangan dalam pendapatannya, masih menggunakan sistem hasil evaluasi kerja pada tahun-tahun sebelumnya sebagai acuan dalam menentukan target dan realisasi pendapatan, menciptakan administrasi pelayanan yang mudah bagi semua lini yang terkait dengan manajemennya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan terlebih dahulu, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem pencatatan akuntansi dalam sektor pendapatan di Dinas Kesehatan Kota Lamongan?
2. Bagaimanakah manajemen pendapatan di Dinas Kesehatan Kota Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada paparan rumusan masalah di atas, maka tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pencatatan akuntansi dalam sektor pendapatan Dinas Kesehatan Kota Lamongan.
2. Untuk mengetahui manajemen Pendapatan di Dinas Kesehatan Kota Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Dinas Kesehatan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu bahan acuan dan evaluasi bagi Dinas Kesehatan dalam proses pencatatan akuntansi serta manajemen yang dipakai dalam bidang pendapatannya.

2. Manfaat Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah koleksi penelitian serta menjadi acuan penelitian dan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin meneliti topik yang sama namun dengan masalah dan lokasi yang berbeda di lingkungan Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Trunojoyo Madura.

1.5 Lokasi dan Waktu

Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Jl. dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57 Lamongan, yang dilaksanakan pada 13 Januari 2014-14 Februari 2014.